

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Myanmar merupakan negara bekas jajahan Inggris yang memperoleh kemerdekaannya pada 4 Januari 1948. Setelah merdeka, Myanmar menerapkan sistem demokrasi parlementer dengan U Nu sebagai perdana menteri. Di bawah pemerintahan U Nu, Myanmar mengalami beberapa permasalahan yang menyebabkan banyak protes dari masyarakat. Pada saat itu terjadi stagnansi ekonomi, dan instabilitas dalam negeri. Kondisi dalam negeri Myanmar yang tidak stabil membuat U Nu menunjuk Jenderal Ne Win sebagai *caretaker* yang bertugas menyelesaikan permasalahan tersebut. Penunjukkan inilah yang menjadi awal masuknya militer ke pemerintahan.

Jenderal Ne Win kemudian melakukan kudeta karena menganggap pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan dalam negeri dengan baik. Dari pihak militer mengklaim bahwa merekalah yang berhasil mencegah Myanmar terdisintegrasi. Pada akhirnya, tahun 1962 menjadi awal rezim militer, di bawah pimpinan Jenderal Ne Win berkuasa.

Di bawah rezim militer, politik dalam negeri Myanmar didominasi oleh pengembangan wacana politik luar negeri dan keamanan nasional yang tidak memberi ruang bagi kelompok di luar elit untuk berpartisipasi.<sup>1</sup> Semua partai politik, asosiasi, dan *unions* dianggap ilegal. Pembentukan partai politik dan gerakan protes pun dilarang. Satu-satunya partai politik yang ada adalah *Burma Socialist Programme Party* (BSPP). Agensi-agensinya asing banyak yang dikeluarkan dari Myanmar. Selain itu,

---

<sup>1</sup> Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

berbagai asosiasi independen diambil alih oleh militer atau dipaksa untuk membubarkan diri. Secara bertahap, rezim militer menguasai seluruh aspek pemerintahan di bawah kekuasaannya.

Untuk politik luar negeri, rezim militer Myanmar menerapkan sistem isolasionis. Rezim Jenderal Ne Win menarik Myanmar untuk terlibat dalam konflik internasional dan mengisolasi diri dari dunia internasional. Myanmar juga tidak terlibat dalam aliansi militer dan politik internasional. Aktifitas diplomatik juga mulai dibatasi. Saat itu, Myanmar hanya memberikan visa kepada orang asing untuk masuk selama 24 jam dan dikhususkan di Yangon saja.

Kebijakan luar negeri Myanmar juga berfokus pada upaya melindungi ekonomi dan mencegah disintegrasi. Selama periode tersebut, Myanmar menerapkan politik luar negeri *non-alignment* dan *neutrality*, dan bergabung ke dalam Persemakmuran Inggris (*British Commonwealth*). Sejak tahun 1962, Myanmar berusaha untuk memutus hubungan dengan dunia internasional.

Myanmar melakukan nasionalisasi terhadap sektor pertanian dan perbankan, kilang minyak, *foreign trade*, asuransi, *shipping*, *wholesale trade*, dan lain-lain. Selain itu, sekolah-sekolah dan swasta serta industri dan pertokoan skala besar juga dinasionalisasi. Semua bisnis yang dijalankan oleh orang India dan Tiongkok diberikan kepada penduduk Myanmar asli (*indigenous*). Hal ini kemudian membuat ribuan orang India dan Tiongkok keluar meninggalkan Myanmar.

Walaupun melakukan nasionalisasi, Myanmar masih berupaya meningkatkan perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor tetapi dibatasi hanya untuk gas alam, produk agrikultur, dan *assistance* yang diizinkan

untuk usaha pengembangan.<sup>2</sup> Setelah pemerintahan Ne Win banyak melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Myanmar. Perekonomian Myanmar diambil alih dan didominasi menjadi *black-market economy*.<sup>3</sup>

Sejak awal, Myanmar merupakan negara agraris yang bergantung pada pertanian. Pada tahun 2002, 57,2% dari Gross Domestic Product (GDP) Myanmar berasal dari sektor pertanian. Sedangkan untuk sektor industri hanya menyumbang sebesar 7,8% di tahun yang sama. Baru kemudian komoditas ekspor utama Myanmar beralih menjadi gas alam.

Rezim militer juga diduga melakukan kerja paksa yang sistematis dalam skala besar. Umumnya, kerja paksa ini dilakukan di sektor infrastruktur, seperti pembangunan rel kereta api, jalan raya, konstruksi, dan promosi pariwisata. Hal ini menyebabkan International Labour Organizations (ILO) menuntut dilakukannya perbaikan terhadap hak-hak buruh di Myanmar.<sup>4</sup>

Berbagai permasalahan politik dan ekonomi kemudian mulai bermunculan. Tingkat korupsi di Myanmar meningkat drastis. Pada saat yang sama, terjadi

---

<sup>2</sup> Devi, Konsam Shakila. 2014. "Myanmar under the Military Rule 1962-1988." *International Research Journal of Social Sciences* Vol. 2 hlm. 48

<sup>3</sup>Xu, Beina, dan Eleanor Albert. 2016. *Understanding Myanmar*. 25 Maret. <http://www.cfr.org/human-rights/understanding-myanmar/p14385>

<sup>4</sup> Apriyanti, Devi. 2017. "Reformasi Politik dan Ekonomi di Myanmar pada Masa Pemerintahan Presiden U Thein Sein (2011-2013)." Hlm. 6 *neliti.com*. 10 November. <https://media.neliti.com/media/publications/31474-ID-reformasi-politik-dan-ekonomi-di-myanmar-pada-masa-pemerintahan-presiden-u-thein.pdf>.

kelangkaan makanan yang menyulitkan masyarakat. Kemudian terjadi kerusuhan dan demonstrasi yang diikuti oleh masyarakat dan mahasiswa. Kerusuhan tersebut menewaskan kurang lebih 3,000 orang demonstran.

Rezim militer sering dianggap menggunakan *military prerogative* dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini dapat berlangsung dalam bidang politik dan ekonomi. Tujuan adanya *military prerogative* antara lain untuk memperpanjang rezim itu sendiri. Dalam bidang ekonomi, *military prerogative* berbentuk kontrol langsung terhadap perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi (*state-owned*).<sup>5</sup>

Salah satu contoh perusahaan yang dikuasai adalah *Union of Myanmar Economic Holding Ltd.* (UMEH). UMEH merupakan gabungan perusahaan dan konglomerat yang berada di bawah Kementerian Pertahanan (*Ministry of Defence Procurement*). Perusahaan ini membawahi berbagai bidang perekonomian, antara lain: transportasi; perbankan; pariwisata; *mining*; dan investasi asing. Profit yang didapat dari UMEH 40% dikuasai oleh kementerian dan 60% sisanya dimiliki oleh personel aktif dan veteran pertahanan.

Di tahun 1990, ada upaya untuk mengakhiri rezim militer menuju rezim sipil yang demokratis. Upaya ini ditandai dengan diadakannya pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai dan mengedepankan kompetisi dan partisipasi antarpartai. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai prodemokrasi, yakni, *National League for Democracy* (NLD) dan partai bentukan junta militer, *National Unity Party* (NUP).

Hasil akhir pemilu ini menunjukkan bahwa NLD keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara sebesar

---

<sup>5</sup> Pereira, Anthony W. t.thn. *Military Rule*. Diakses November 18, 2017. <https://www.britannica.com/topic/military-rule>

58,7% dan mendapatkan jumlah kursi sebesar 392 kursi. Sedangkan, NUP hanya memperoleh suara sebesar 3% dan memperoleh 10 kursi di pemerintahan.

Kekalahan partai junta militer kemudian memicu pembersihan politik yang dilakukan oleh militer untuk menganulir hasil pemilu. Pembersihan politik ini dilakukan dengan menahan pimpinan NLD menjadi tahanan rumah, membungkam semua gerakan prodemokrasi, dan menjatuhkan hukuman jangka panjang terhadap beberapa anggota NLD.<sup>6</sup> Setelah kejadian ini, rezim militer pun kembali berkuasa dan berganti pemimpin menggantikan kepemimpinan sebelumnya.

Pembersihan politik yang dilakukan Myanmar membuat banyak pihak menduga telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya. Pada saat itu, Myanmar menjadi sorotan dunia internasional, khususnya Amerika Serikat. Myanmar dianggap telah melakukan pelanggaran berat dan kemudian mendapat peringatan dan tekanan dari dunia internasional.

Myanmar kemudian dijatuhi embargo ekonomi oleh Amerika Serikat sebagai upaya penekanan. Mulai dari 1997-2007, Amerika Serikat menjatuhkan embargo ekonomi terhadap Myanmar melalui beberapa peraturan, antara lain: Pelarangan investasi di Myanmar bagi warga negara dan perusahaan Amerika Serikat; Pelarangan impor produk dari Myanmar ke Amerika Serikat; dan Pemblokiran semua properti pejabat junta militer yang berada di Amerika Serikat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Satyadinata, Kadek Wema. 2014. "Upaya Menuju Demokrasi di Myanmar Tahun 1990." *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Udayana* hlm. 6

<sup>7</sup> Anggara, Mustavidy, dan Tri Joko Waluyo. 2014. "Motivasi Amerika Serikat Menjatuhkan Embargo Ekonomi Terhadap Myanmar Tahun 2007." *Jurnal Online Mahasiswa Universitas*

Tahun 2008, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) merilis laporan dalam *The Least Developed Countries Report 2008* mengenai daftar negara yang dikategorikan miskin. Myanmar menjadi satu-satunya negara ASEAN yang masuk di dalam daftar tersebut, bersama negara-negara Afrika, seperti Rwanda, Djibouti, dan Lesotho.<sup>8</sup>

Menurut data perekonomian, Myanmar masih mengalami kekurangan dalam beberapa indikator. Contohnya adalah GDP, *primary income* dari investasi asing, dan nilai ekspor.

Menurut data World Bank, GDP Myanmar masih terbilang rendah. Sebagai contoh, GDP Myanmar pada tahun 2008 berada pada angka 20,1 miliar dolar AS. Jauh lebih rendah dibandingkan GDP Vietnam yang, pada tahun yang sama, mencapai 99,13 miliar dolar AS.<sup>9</sup>

Setelah upaya demokratisasi di akhir 1980-an gagal, pada tahun 2003 muncul inisiasi demokratisasi dari pemerintahan. Prakarsa menuju demokrasi ini dicanangkan oleh Jenderal Khin Nyunt dalam *Seven Steps Roadmap to Democracy*. Upaya tersebut berisi langkah-langkah yang akan diimplementasikan oleh Pemerintah Myanmar untuk mereformasi peraturan politiknya.

Pada tahun 2010-2011, rezim militer Myanmar telah resmi berakhir. Di tahun tersebut Thein Sein terpilih menjadi presiden pertama yang dipilih secara demokratis.

---

Riau. 1 Januari.  
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2332/2274>

<sup>8</sup> UNCTAD. 2008. *The Least Developed Countries Report 2008*.  
 Jenewa: United Nations publication

<sup>9</sup> WorldBank. t.thn. Myanmar.  
<https://data.worldbank.org/country/myanmar>

Myanmar mulai beralih dari rezim militer menuju rezim sipil demokratis.

Ketika terjadi peralihan rezim, umumnya diikuti dengan reformasi peraturan di berbagai bidang, termasuk politik dan ekonomi. Untuk bidang ekonomi, dapat dilihat dari perubahan strategi dan peraturan perekonomiannya. Begitu pun strategi perekonomian di Myanmar yang tidak terlewat untuk diubah setelah rezim sipil demokratis mengambil alih pemerintahan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: *Bagaimana strategi perekonomian di Myanmar pascademokratisasi tahun 2012-2017?*

## **C. Landasan Teoritik**

### **1. Konsep Development Strategy**

*Development* atau Pembangunan adalah sebuah fenomena yang multidimensional. Isu pembangunan mencakup aspek politik, sosial, dan ekonomi, yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam menjalankan upaya pembangunan, para pembuat kebijakan perlu untuk melakukan integrasi antara aspek politik, sosial, dan ekonomi. Upaya untuk mengintegrasikan ini harus dibuat secara strategis (*strategically*) agar semua tujuan pembangunan dapat tercapai.

Menurut Brian Levy dan Francis Fukuyama, pembangunan atau *development* memiliki beberapa dimensi, antara lain: *state-building*; *development of civil society*; *liberal democratic political institutions*; dan *economic growth*. Tiap-tiap dimensi ini memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda. Seperti yang

sudah dijelaskan, semua dimensi tadi memiliki keterkaitan satu sama lain dalam beberapa hal.<sup>10</sup>

United Nations Development Programs (UNDP) mengeluarkan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan masa sekarang adalah mengurangi kemiskinan (*poverty reduction*). UNDP mencatat bahwa sekitar 800 juta orang idup di bawah 1,25 dolar Amerika, yang merupakan standar kemiskinan dunia, dan tidak mendapat akses yang layak untuk makanan, air layak minum, dan sanitasi yang baik.<sup>11</sup>

*Economic Growth* dianggap berkaitan dengan *poverty reduction* karena pertumbuhan dapat menawarkan kesempatan ekonomi bagi mereka yang tergolong miskin untuk meningkatkan kondisi perekonomian mereka. Pertumbuhan ekonomi akan dapat disalurkan kepada kaum miskin melalui berbagai cara salah satunya melalui peningkatan sektor jasa (kesehatan, sekolah, infrastruktur).<sup>12</sup>

Ada dua strategi sentral yang sering digunakan dalam upaya memenuhi pembangunan ekonomi. Melakukan percepatan *economic growth* melalui *growth strategies*. Mengurangi ketidaksetaraan (*inequality*) antara kaya-miskin melalui redistribusi

---

<sup>10</sup> Levy, Brian, dan Francis Fukuyama. 2010. *Development Strategy: Integrating Governance and Growth*. The World Bank. Hlm. 3

<sup>11</sup>UNDP. t.thn. *Goal 1: No Poverty*. Diakses Maret 29, 2018. <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-poverty.html>

<sup>12</sup> Parel, Danileen Kristel C. 2014. *Growthand Redistribution: Is there 'Trickle Down' Effect in the Philippines?* Discussion Paper, Makati City: Philippines Institute for Development Studies hlm. 1



pemasukan (*income redistribution*), atau gabungan dari keduanya.<sup>13</sup>

Berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai dua strategi besar, *growth strategies* dan *redistribution*.

#### a. *Growth Strategies*

Dani Rodrik merujuk *growth strategies* sebagai “*economic policies and institutional arrangements aimed at achieving economic convergence with the living standards prevailing in advanced countries*”.<sup>14</sup> *Growth strategies* umumnya melibatkan pendekatan formulasi yang responsif dan kebijakan yang berkelanjutan (*sustainable*) dalam konteks tantangan-tantangan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa tantangan dan isu kompleks yang dihadapi ketika menerapkan *growth strategies*.

Commission on Growth and Development berpendapat bahwa *growth strategies* yang sukses memerlukan kejelasan mengenai sasaran pembangunan, dan realisme tentang *underlying model*, dan *socio-political buy-in*. Selain itu, *growth strategies* melibatkan sebuah pola pikir yang dinamis yang responsif terhadap ketidakjelasan yang pasti tidak terhidarkan dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi melalui proses yang terjadi berulang-ulang. Negara perlu kebijakan reaktif yang dapat digunakan ketika ada

---

<sup>13</sup> Dagdeviren, Hulya, Rolph van der Hoeven, and John Weeks. 2000. "Redistribution Matters: Growth for Poverty Reduction." Working Paper hlm. 2

<sup>14</sup> Rodrik, Dani. 2004. "Growth Strategies ." Paper, Cambridge hlm. 3

ada tantangan yang menyinggung masalah finansial internal dan eksternal.

Lebih lanjut, Commission on Growth and Development menjabarkan beberapa 'bahan' yang dapat menghasilkan pertumbuhan, antara lain:

- i) Kepercayaan kepada sistem pasar untuk alokasi sumber daya (*resource allocation*), meliputi *price signals*, insentif, desentralisasi, dan kejelasan tentang definisi dari kepemilikan properti untuk memfasilitasi transaksi dan investasi.
- ii) Komitmen untuk memfokuskan pertumbuhan kepada pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustained growth*) dan pemerintahan yang bertugas sebagai perwakilan dari kepentingan rakyat.
- iii) Pemerintahan dan kepemimpinan yang efektif dalam membangun konsensus di balik kebijakan yang didesain untuk menghasilkan perubahan dari waktu ke waktu (*intertemporal*).
- iv) Manajemen yang kompeten dalam mempromosikan investasi asing dan domestik.
- v) Tingginya jumlah simpanan (*savings*) dan investasi umum dan swasta.
- vi) Adanya mobilitas sumberdaya, khususnya mobilitas buruh, ditambah dengan pengadaan lapangan pekerjaan. Serta adanya perpindahan dari *rural area* menuju *urban area*.
- vii) Memanfaatkan ekonomi global untuk mempercepat pertumbuhan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> El-Erian, Mohamed A., dan Michael Spence. 2008. *Growth Strategies and Dynamics: Insight from Country Experiences*.

b. *Income Redistribution*

*Income redistribution* adalah praktik ekonomi yang bertujuan untuk mengatur distribusi pemasukan di masyarakat melalui transfer langsung atau tidak langsung dari pihak yang kaya ke pihak yang miskin. Praktik ini dilakukan untuk berbagai tujuan. Beberapa bertujuan untuk memperkecil *income inequality* antara kaya-miskin. Sedangkan beberapa lainnya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Penerapan *income redistribution* berdasarkan pertimbangan mengenai keburukan-keburukan sosial (*social vices*) dan efek negatif dari perbedaan gap pemasukan yang ekstrem pada suatu negara. Penerapan *redistribution income* ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Beberapa di antaranya melibatkan pemerintah sementara yang lainnya melibatkan organisasi-organisasi dan individu.<sup>16</sup>

Dalam buku *Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga*, Michael. P. Todaro mengatakan bahwa *income redistribution* dapat dilakukan pemerintah melalui pengambilan sebagian pendapatan golongan-golongan penduduk yang berpenghasilan tinggi melalui pemberlakuan pajak secara proporsional terhadap pendapatan dan kekayaan pribadi mereka, untuk dimanfaatkan agar mengangkat kesejahteraan lapisan penduduk termiskin. Pajak tersebut kemudian akan digunakan untuk berbagai program bantuan pelayanan sosial dan peningkatan kesejahteraan serta pendapatan

---

Working Paper, Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development hlm. 3

<sup>16</sup> Martin. 2016. *Income Redistribution*. 3 Agustus. Diakses Maret 29, 2018. <https://www.cleverism.com/lexicon/income-redistribution-definition/>

kelompok-kelompok masyarakat yang berpenghasilan paling rendah.<sup>17</sup>

Kebijakan-kebijakan yang mendukung *income redistribution* bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan (*equality*) dengan melakukan distribusi *income-generating assets*, seperti *human capital*, *industrial* dan *financial capital*, dan tanah, bagi individu dan sektor publik serta swasta.<sup>18</sup>

Transfer uang dan jasa adalah satu dari sekian banyak cara *income redistribution*. Pemerintah dapat melakukan transfer pendapatan dengan membatasi kompetisi antara produsen-produsen. Bentuk pembatasan yang lain adalah dengan melakukan restriksi di sektor impor. Pemerintah dapat melakukan pembatasan impor dengan mengalihkan para konsumen ke produsen domestik.<sup>19</sup>

## 2. Teori Demokrasi

Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan dengan itu pemerintahan yang terlegitimasi adalah pemerintahan yang

---

<sup>17</sup> Todaro, Michael P. 1997. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga / Edisi Keenam / Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga hlm. 208

<sup>18</sup> Kohler, Pierre. 2015. *Redistributive Policies for Sustainable Development: Looking at the Role of Assets and Equity*. Working Paper, New York: UN DESA hlm. 1

<sup>19</sup> Lee, Dwight R. t.thn. *Redistribution of Income*. Diakses April 4, 2018.

<http://www.econlib.org/library/Enc1/RedistributionofIncome.html>

didukung oleh rakyat banyak. Hakikat pemerintahan demokrasi ialah pemerintahan yang didasarkan pada kepentingan rakyat serta bertujuan untuk kepentingan mereka secara umum.

Robert Dahl, menjabarkan keunggulan demokrasi dibandingkan alternatif-alternatif lain yang ada. Menurut Dahl, demokrasi setidaknya menghasilkan beberapa hal yang diinginkan, seperti: terhindarnya tirani atau kekuasaan yang sewenang-wenang; terwujudnya kebebasan umum; terjadinya persamaan politik; tercapainya kemakmuran; dan terciptanya perdamaian.

Dahl menjabarkan bahwa negara-negara dengan pemerintahan demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.

Demokrasi membantu perkembangan pendidikan rakyatnya; tenaga kerja terdidik sangat bermanfaat bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Aturan-aturan hukum biasanya bertahan lebih lama; lembaga-lembaga pengadilan lebih mandiri; hak-hak kepemilikan lebih terjamin; perjanjian kontrak dijalankan lebih efektif; dan intervensi sewenang-wenang oleh pemerintah dan politisi dalam perekonomian dapat dikurangi.

Di negara yang menerapkan demokrasi, terdapat kebebasan dalam menjalankan perekonomian. Hal ini terlihat dari pasar yang tidak terlalu diatur, para pekerja bebas untuk berpindah tempat mereka bekerja, perusahaan-perusahaan swasta bersaing dalam hal penjualan dan perolehan sumber daya, dan konsumen dapat memilih barang-barang dan jasa yang ditawarkan penyuplai.

Negara demokratis dalam menjalankan perekonomian juga diuntungkan karena mereka dapat mengikuti perkembangan zaman dan modernisasi, khususnya dalam berkomunikasi. Karena ekonomi

modern bergantung pada komunikasi yang melewati batas negara, dan untuk negara demokratis, penghalang dalam berkomunikasi jauh lebih sedikit.<sup>20</sup>

Secara umum, demokrasi menghasilkan kesempatan yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan *cultural progress* dibandingkan rezim otoritarian. Beberapa ahli seperti Milton Friedman berpendapat “*that a higher degree of right fostered economic development.*”<sup>21</sup>

Demokrasi sendiri memungkinkan terjadinya liberalisasi dalam kegiatan berekonomi. Selain itu, arah kebijakan ini akan pro-pasar atau bersifat *market-oriented*. Hal ini terjadi karena demokrasi lebih mengedepankan kompetisi dan partisipasi dalam berkegiatan.

Myanmar ketika di bawah rezim militer mengedepankan gaya berekonomi yang berpegangan pada *The Burmese Way to Socialism*. Cara ini merupakan upaya untuk membuat sebuah *self-sufficient state* yang bebas dari pengaruh kapitalis dan komunis. Di awal tahun 1970an, semua kegiatan perekonomian besar selain agrikultur, bisnis-bisnis kecil, dan beberapa *retail trade*, dan transportasi darat dan air sudah dinasionalisasi. *Extremely socialist* dan *control-oriented command economy* muncul pada waktu tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Dahl, R. A. (2001). *Perihal Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

<sup>21</sup> Li, Rita Yi Man. t.thn. *Is Democracy a Pre-Condition in Economic Growth? A Perspective from the Rise of Modern China*. <https://unchronicle.un.org/article/democracy-pre-condition-economic-growth-perspective-rise-modern-china>

<sup>22</sup> Thein, Myat. 2004. *Economic Development of Myanmar*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies hlm 5; Tallentire, Mark. 2007. *The Burma road to ruin*. 28 September.

Melalui *The Burmese Way to Socialism*, ideologi ini berdasarkan pada ekonomi sosialis yang dideskripsikan sebagai “*the planned proportional development of all the national productive sources*”. Secara spesifik dilakukan dengan nasionalisasi alat-alat produktif yang penting, seperti alat produksi, distribusi, transportasi, dan komoditas pertanian dan industrial; penutupan gap pendapatan dan pengakuan terhadap pekerja dan petani sebagai pelopor dan pemelihara (*vanguard and custodian*) dalam “*Socialist Democratic State*”<sup>23</sup>

Menurut Sean Turnell dari Burma Economic Watch, rezim militer telah melakukan *mismanagement* bagi perekonomian Myanmar dengan menggabungkan perencanaan yang kaku dan terkesan *Soviet-type* dengan kepercayaan-kepercayaan yang *superstitious*. Hal ini menyebabkan di Myanmar terjadi kemiskinan yang cukup parah. Masyarakat Myanmar kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Selain itu, tingkat infeksi HIV tinggi, karena hanya sekitar tiga persen saja anggaran yang dialokasikan untuk kesehatan. Pemasukan yang diperoleh Myanmar langsung menuju pemimpin militer dan elit di pemerintahan.<sup>24</sup>

---

Diakses April 3, 2018.  
<https://www.theguardian.com/world/2007/sep/28/burma.uk>

<sup>23</sup> Mehden, Fred R. von der. 1963. ""The Burmese Way to Socialism"." *Asian Survey Vol. 3 No. 3* 129-135 hlm. 131

<sup>24</sup> VoANews. 2009. '*Burmese Way to Socialism*' Drives Country into Poverty . 1 November. Diakses April 3, 2018.  
<https://www.voanews.com/a/a-13-2007-10-04-voa10/403961.htm>

### 3. Konsep Open-Market

Open Market adalah sebuah sistem ekonomi tanpa batasan untuk membebaskan aktifitas pasar. Sistem ini dicirikan dengan tidak adanya tarif, pajak, lisensi, subsidi, perserikatan (*unionizing*), dan peraturan atau praktik lain yang mengganggu pasar yang sudah berfungsi.

Bentuk ini berbanding terbalik dengan *closed market* atau *protectionist market*. Closed market berupaya untuk melindungi produsen-produsen domestiknya dari kompetisi internasional. Sistem ini dapat membatasi siapa yang dapat berpartisipasi dan menentukan harga yang ditentukan bukan berdasarkan permintaan dan suplai (*demand and supply*). Walaupun di lapangan, tidak ada yang seluruhnya menerapkan *open market* maupun *closed market*.<sup>25</sup>

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menjelaskan bahwa open market untuk barang, jasa, dan investasi dapat membantu negara-negara untuk menggunakan sumberdaya, *human and physical*, dalam cara yang paling efisien, dengan mengonsentrasikan produksi di sektor yang paling kompetitif.<sup>26</sup>

Hasil dari keterbukaan pasar dan perdagangan dan diukur dalam pertumbuhan ekonomi,

---

<sup>25</sup> Investopedia. (t.thn.). *Open Market*. Diambil kembali dari Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/o/open-market.asp>

<sup>26</sup> OECD. (t.thn.). *Do open markets matter or is protectionism the answer?* Diambil kembali dari OECD.org: <http://www.oecd.org/trade/doopenmarketsmatterorisprotectionismtheanswer.htm>



produktifitas, standar hidup yang lebih tinggi, inovasi-inovasi, dan promosi perdamaian. Data dari World Bank yang dikutip OECD, menunjukkan bahwa pendapatan per kapita tumbuh tiga kali lebih cepat di negara berkembang yang mengurangi batasan perdagangannya dibanding yang tidak pada 1990an.<sup>27</sup>

Di sisi lain, *protectionism* dianggap akan memberikan efek yang berbeda dengan open market. Dalam *protectionism*, akan ada tarif yang ditentukan untuk berbagai kegiatan perekonomian, salah satunya, ekspor dan impor. Pemasangan tarif bagi ekspor dan impor membuat eksportir kesulitan untuk membayar biaya tersebut. Akibatnya, ekspor mereka akan kurang menguntungkan, atau, tidak bisa mengekspor sama sekali.<sup>28</sup>

#### 4. Konsep Privatisasi

Privatisasi dapat didefinisikan sebagai proses transfer atau perpindahan kepemilikan usaha, aset, atau properti dari pemerintah ke sektor privat atau swasta. Privatisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintah. Kebijakan ini merupakan kebalikan dari nasionalisasi, di mana pemerintah ingin mengambil semua keuntungan dari industri-industri

---

<sup>27</sup>OECD. (t.thn.). *Why open markets matter*. Diambil kembali dari [OECD.org: http://www.oecd.org/trade/whyopenmarketsmatter.htm](http://www.oecd.org/trade/whyopenmarketsmatter.htm)

<sup>28</sup>OECD. (t.thn.). *Do open markets matter or is protectionism the answer?* Diambil kembali dari [OECD.org: http://www.oecd.org/trade/doopenmarketsmatterorisprotectionismtheanswer.htm](http://www.oecd.org/trade/doopenmarketsmatterorisprotectionismtheanswer.htm)

besar, terutama yang memiliki kemungkinan dikontrol oleh kepentingan asing.<sup>29</sup>

Dalam menjalankan privatisasi, terdapat argument-argumen yang mendukung dan menolak. Privatisasi sendiri memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

- 1) Meningkatkan efisiensi, karena pihak privat akan memastikan bahwa efisiensi mereka akan meningkat dalam tujuannya untuk mengurangi biaya produksi dan menambah keuntungan;
- 2) Tidak ada gangguan politik. Pemerintah terkadang tidak mampu membuat keputusan sulit terutama ketika berkaitan dengan hal-hal yang mendatangkan publisitas negatif; dan
- 3) Meningkatkan kompetisi. Ketika sebuah perusahaan sudah tidak mendapat perlindungan dari pemerintah, maka mereka harus beradaptasi dengan memberikan jasa dan produk-produk yang lebih baik untuk dapat bertahan dan menjalankan bisnisnya.

Di sisi lain, privatisasi dianggap mendatangkan beberapa kerugian, di antaranya:

- 1) *Natural Monopoly*. Proses ini terjadi ketika hanya ada satu perusahaan yang berhasil menjalankan efisiensi. Sehingga tidak ada kompetisi dan kemungkinan mengeksploitasi konsumen;
- 2) *Public Interest*. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, perusahaan privat umumnya mengejar keuntungan dan efisiensi. Dalam sektor-sektor penting, seperti kesehatan dan pendidikan,

---

<sup>29</sup> Britannica. (t.thn.). *Privatization*. Diambil kembali dari Encyclopaedia Britannica:  
<https://www.britannica.com/topic/privatization>

dikhawatirkan perusahaan akan lebih mementingkan profit dibanding kepentingan konsumen, kemudian tidak memberikan pelayanan terbaik;

- 3) Kesulitan mengatur monopoli swasta. Ketika sudah tidak ada di bawah pemerintah, akan lebih sulit bagi pemerintah untuk mengontrol dan mengatur monopoli. Akan tetapi, masih diperlukan peran pemerintah untuk mengatur semua kegiatan khususnya ketika ada monopoli swasta.<sup>30</sup>

## 5. Konsep Demokratisasi

Demokratisasi adalah proses transisi suatu negara dari rezim nondemokratis menuju rezim yang lebih demokratis. Salah satu bentuknya adalah transisi dari rezim militer otoriter menuju sistem sipil demokratis.

Periode transisi demokrasi berlangsung ketika rezim otoriter runtuh, sampai dengan tercapainya pelembagaan cara-cara demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahap awal, proses ini akan mengalami hambatan dikarenakan para

---

<sup>30</sup> ENotes. (t.thn.). *What are the advantages and disadvantages of the privatisation of government-owned companies such as airlines?* Diambil kembali dari ENotes.com: <https://www.enotes.com/homework-help/advantages-disadvantages-privatization-airlines-455874>; Pettinger, T. (2017, Mei 12). *Advantages and problems of privatisation*. Diambil kembali dari EconomicHelp.org: <https://www.economicshelp.org/blog/501/economics/advantages-of-privatisation/>

pelaksana pemerintahan masih melakukan penyesuaian. Dalam beberapa kasus, proses ini sering menimbulkan instabilitas politik, walaupun tidak dapat diartikan proses demokratisasi tersebut gagal.<sup>31</sup>

Samuel P. Huntington mengajukan empat pola transisi menuju sistem demokrasi yaitu:

1. Transformasi, ketika para penguasa di pemerintahan menginisiasi dan memainkan peran penentu di akhir rezim;
2. *Replacement*, ketika kelompok oposisi memimpin perjuangan menuju demokrasi;
3. *Transplacement*, ketika proses demokratisasi merupakan gabungan tindakan dari pemerintah dan oposisi setelah terjadi negosiasi; dan
4. Intervensi, di mana lembaga-lembaga demokratis dibentuk dan dipaksakan berlakunya oleh aktor-aktor luar.<sup>32</sup>

Huntington menjelaskan bahwa demokratisasi di sebuah negara sangat mungkin dipengaruhi oleh tindakan-tindakan dari pemerintahan-pemerintahan dan institusi-institusi eksternal negara tersebut. Aktor-aktor asing jelas dapat membantu percepatan demokratisasi terjadi atau justru memperlambat dan membatalkan sebuah negara untuk melakukan proses tersebut. Rezim demokrasi dapat didirikan baik ketika masa penguasaan asing maupun setelah merdeka dari kekuasaan asing.

---

<sup>31</sup> Warsito, T. (2010). *Kapitalisme dan Demokrasi*. Yogyakarta: LP3M UMY.

<sup>32</sup> Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.

Ketika sebuah negara mencapai level sosial dan ekonomi tertentu, maka mereka akan memasuki zona transisi di mana kemungkinan perubahan menjadi negara demokrasi menjadi lebih tinggi. Pengaruh aktor asing mungkin dapat mempercepat terjadinya demokratisasi jauh sebelum negara mencapai level pembangunan tersebut atau dapat mencegah terjadinya demokratisasi setelah negara tersebut mencapai level tertentu.

Pada masa demokratisasi dunia ketiga, aktor eksternal secara signifikan membantu proses tersebut. Banyak negara yang mempromosikan liberalisasi dan demokratisasi. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, serta Uni Eropa secara aktif mempromosikan liberalisasi dan demokratisasi. Dalam setiap upaya menyebarkan upaya demokratisasi di luar batas negara menunjukkan perubahan signifikan dalam kebijakan-kebijakannya.

Huntington mencontohkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan suatu negara untuk mendorong terjadinya demokratisasi di negara lain. Roma atau Vatikan mendelegitimasi rezim otoriter di negara-negara katolik; Brussels memberikan insentif bagi negara-negara di Eropa bagian selatan dan timur untuk melakukan demokratisasi; Amerika Serikat mendorong demokratisasi di Amerika Latin dan Asia; kemudian Moskow menghilangkan halangan-halangan untuk melakukan demokratisasi di Eropa Timur.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Huntington, Samuel P. 1991. *The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press hlm. 85-87

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan kerangka teori dan latar belakang di atas, maka hipotesa yang penulis ambil adalah: Strategi perekonomian Myanmar pascademokratisasi tahun 2012 mengedepankan *growth strategies* dengan membuka perekonomiannya kepada sistem perekonomian dan perdagangan global, membuka peluang investasi asing, dan melakukan privatisasi perusahaan-perusahaan.

#### **E. Alasan Pemilihan Judul**

##### 1. Ketersediaan data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini relatif mudah didapat. Sumber-sumber data yang ada juga sudah tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Selain itu, akses untuk jurnal dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya dapat diperoleh dengan mudah.

##### 2. Keaktualan berita

Proses demokratisasi Myanmar pada tahun 2012 masih menjadi isu yang cukup baru. Perubahan strategi ini juga masih belum selesai karena akan terus mengalami perubahan. Selain itu, isu mengenai strategi perekonomian Myanmar juga masih belum banyak dibahas dan dianalisa.

#### **F. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk isu ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini akan berisi deskripsi terkait strategi perekonomian di Myanmar di bawah rezim militer dan pascademokratisasi.

## 2. Metode Pencarian data

Pada penyusunan penelitian ini, metode pencarian data yang digunakan adalah melalui data sekunder. Data-data penelitian ini diperoleh dari rilis-rilis resmi pemerintah, buku-buku, jurnal, laporan penelitian, *working paper*, berita-berita, dan penelitian yang sudah ada.

## G. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: *Untuk mengetahui strategi perekonomian di Myanmar pascademokratisasi tahun 2012-2017.*

## H. Jangkauan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis memberikan dua jangkauan. *Pertama*, jangkauan bidang, yang berfokus pada aspek ekonomi dan politik. Aspek ekonomi akan membahas gaya berekonomi sebelum dan sesudah peralihan rezim, serta data-data ekonomi yang mendukung penelitian ini. Sedangkan aspek politik akan membahas mengenai kebijakan dalam dan luar negeri sebelum dan sesudah peralihan rezim. Ekonomi dan politik menjadi jangkauan bidang karena keduanya akan saling berkaitan. Politik suatu negara dapat memengaruhi arah dan gaya perekonomian suatu negara.

Jangkauan kedua adalah jangkauan waktu. Penulis memberikan jangkauan waktu dari tahun 2012-2017. Tahun 2012 dipilih karena pada saat itu perubahan rezim resmi dimulai setelah pelantikan Presiden Thein Sein pada 2011. Sedangkan tahun 2017 dipilih sebagai jangka waktu lima tahunan dalam pembangunan jangka pendek.

## I. Sistematika Penulisan

Bab I berisi tentang penkelasan singkat mengenai substansi dan teknik penulisan. Untuk bagian substansi dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah,

kerangka teori dan hipotesa. Sedangkan untuk bagian teknis penulisan dijelaskan dalam alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan rencana sistematika penelitian.

Bab II berisi tentang penjelasan lanjutan mengenai substansi penelitian. Pada bab ini dijelaskan lebih lanjut mengenai sejarah demokratisasi Myanmar serta kondisi politik dan ekonomi Myanmar di bawah rezim militer. Bab ini berisi data-data perekonomian dan politik untuk memberikan gambaran.

Bab III berisi tentang proses demokratisasi di Myanmar. Penjelasan dimulai dari bagian awal upaya demokratisasi hingga hasil akhir yang diperoleh. Bab ini berisi penjelasan upaya demokratisasi dari tahun 1990, 2003, dan 2010.

Bab IV berisi tentang penjelasan kebijakan politik dan ekonomi di bawah rezim sipil. Penjelasan Bab ini meliputi kebijakan dalam dan luar negeri. Pada bab ini dibahas mengenai strategi kebijakan perekonomian Myanmar di bawah rezim sipil.

Bab V berisi kesimpulan dari penelitian ini. Bab ini memberikan hasil akhir dari penelitian setelah dilakukan analisa pada bab sebelumnya dengan memperhatikan pada latar belakang dan kerangka teori yang sudah ada.